



Analisis Kebijakan Publik dalam Upaya Menekan Angka Stunting: Studi Kasus Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Palembang

Farcos Nuryas Aulia Putri Ramadani, Shafiqah Ryzki Innayah, Ela Talia, Nabila Apriliya Ketrin, Amanda Gutawa Pister Putri, Amirah Azaria Lintang, Dwi Sifa Ulya, Riza Adelia Suryani, Novitry Pratiwi, Galuh Efnol Adzan

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia.



Correspondence: auliaputriramadani850@gmail.com

Abstract.

Stunting remains a nutritional problem that requires attention in Palembang City. One of the government efforts to address this issue is the Supplementary Feeding Program (PMT). This study aims to analyze the policy implementation of the Supplementary Feeding Program (PMT) in Palembang City from a public policy analysis perspective. The study uses a descriptive qualitative approach with a literature review method based on relevant scientific journals, books, government documents, regulations, and official publications. The findings indicate that PMT implementation can be analyzed retrospectively because the program has been implemented and can be examined based on its implementation, outcomes, and identified problems. The implementation analysis is based on Edward III's theory, which covers communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, while the policy analysis process includes problem formulation, forecasting, recommendation, monitoring, and evaluation. The PMT Program has reached its target groups, but problems remain in consumption monitoring, distribution, supervision, funding, resources, communication, and coordination. Program improvement should focus on strengthening monitoring and evaluation, implementer capacity, resources, public education, and cross-sector coordination.

Keywords: Public Policy Analysis, Policy Implementation, Stunting, Supplementary Feeding Program, Palembang City.

Abstrak.

Stunting masih menjadi salah satu masalah gizi yang perlu mendapat perhatian di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Palembang berdasarkan perspektif analisis kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PMT di Kota Palembang berdasarkan perspektif analisis kebijakan publik. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku, dokumen pemerintah, peraturan, dan publikasi resmi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi PMT dapat dianalisis secara retrospektif karena program telah dilaksanakan dan dapat ditinjau berdasarkan pelaksanaan, hasil, serta permasalahan yang ditemukan. Analisis implementasi berdasarkan teori Edward III mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan proses analisis kebijakan meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. PMT telah menjangkau kelompok sasaran, tetapi masih ditemukan permasalahan pada pemantauan konsumsi, distribusi, pengawasan, pendanaan, sumber daya, komunikasi, dan koordinasi. Perbaikan program perlu diarahkan pada penguatan monitoring dan evaluasi, kapasitas pelaksana, sumber daya, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor.

Kata kunci: Analisis Kebijakan Publik, Implementasi kebijakan, Stunting, Pemberian Makanan Tambahan, Kota Palembang.

1. Pendahuluan

Stunting masih menjadi salah satu masalah gizi yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keadaan gizi ibu selama kehamilan, kondisi sosial ekonomi, penyakit yang dialami anak, serta pemenuhan kebutuhan gizi yang belum optimal (Salsabila et al., 2024). Permasalahan tersebut juga

masih ditemukan di Kota Palembang. Berdasarkan data EPPGBM Dinas Kesehatan Kota Palembang yang digunakan dalam penelitian Salsabila et al. (2024), terdapat 517 balita stunting pada tahun 2022, dengan prevalensi di bawah 2,5%. Sementara itu, Rosalina dan Heriziana (2024) mencatat bahwa jumlah kasus stunting di Kota Palembang mengalami penurunan, yaitu dari 992 kasus pada tahun 2021 menjadi 555 kasus pada tahun 2022 dan 437 kasus pada tahun 2023. Meskipun jumlah kasus menunjukkan penurunan, kondisi tersebut tetap menunjukkan bahwa masalah stunting masih perlu mendapat perhatian dan penanganan yang berkelanjutan.

Penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab bidang kesehatan, tetapi juga membutuhkan peran pemerintah melalui kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerapkan kebijakan tersebut agar dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya sampai di tingkat masyarakat. Di Kota Palembang, salah satu upaya tersebut didukung oleh Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan, Pengendalian dan Penurunan Stunting Terintegrasi. Peraturan ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai upaya untuk mencegah dan menurunkan stunting secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Upaya tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi dan pemantauan kondisi anak sebagai bagian dari penanganan stunting. Salah satu program yang dilakukan untuk mendukung pemenuhan gizi tersebut adalah Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Program ini diberikan sebagai salah satu bentuk intervensi untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan asupan gizinya. Ulya dan Maharani (2024) menjelaskan bahwa PMT dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu menangani masalah gizi pada balita stunting dan mendukung perbaikan kondisi gizi. Di Kota Palembang, pelaksanaan PMT juga diperkuat melalui Keputusan Walikota Palembang Nomor 47 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan di Pos Pelayanan Terpadu Kota Palembang Tahun 2026. Keputusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan PMT penyuluhan melalui Posyandu di Kota Palembang. Dengan adanya kebijakan tersebut, PMT tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pemberian makanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung penanganan stunting di tingkat masyarakat.

Meskipun telah memiliki kebijakan dan program, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian Ulya dan Maharani (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan PMT secara umum sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan media edukasi, adanya keluarga balita yang menolak makanan tambahan, serta pengawasan dan pemantauan yang belum optimal. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pencapaian program belum sepenuhnya maksimal dan angka stunting masih mengalami perubahan. Selain itu, penelitian Simbolon et al. (2024) mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat menghadapi kendala dalam komunikasi, ketersediaan sumber daya, struktur birokrasi, dan pengawasan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu program saja belum cukup untuk menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Pelaksanaan di lapangan dan dukungan dari berbagai pihak juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis kebijakan publik untuk melihat bagaimana suatu kebijakan dijalankan dan sejauh mana pelaksanaannya mampu menjawab permasalahan yang ada. Analisis kebijakan dapat membantu melihat masalah yang menjadi dasar kebijakan, proses pelaksanaan program, faktor yang mendukung maupun menghambat, serta hasil yang diperoleh setelah kebijakan diterapkan. Dalam penelitian Simbolon et al. (2024), analisis implementasi digunakan untuk melihat berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan pengawasan merupakan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, analisis kebijakan terhadap program PMT dapat digunakan untuk melihat kesesuaian program dengan permasalahan yang dihadapi, bagaimana program dilaksanakan, serta bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelaksanaan program pada tahap berikutnya.

Kota Palembang dipilih sebagai fokus kajian karena permasalahan stunting masih ditemukan meskipun jumlah kasusnya menunjukkan penurunan. Data penelitian Salsabila et al. (2024) mencatat 517 balita stunting di Kota Palembang pada tahun 2022, sedangkan Rosalina dan Heriziana (2024) mencatat 437 kasus pada tahun 2023. Di sisi lain, Pemerintah Kota Palembang telah memiliki kebijakan yang mendukung upaya penanganan stunting dan pelaksanaan PMT melalui Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 serta Keputusan Walikota Nomor 47 Tahun 2026. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk melihat bagaimana kebijakan dan program PMT dilaksanakan dalam konteks penanganan stunting di Kota Palembang. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Palembang sebagai studi kasus untuk melihat penerapan analisis kebijakan publik dalam upaya menekan angka stunting.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan menekankan pemahaman terhadap makna dan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai salah satu upaya penanganan stunting di Kota Palembang serta mengkajinya berdasarkan klasifikasi, tahapan, dan manfaat analisis kebijakan publik.

Metode studi literatur digunakan karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara atau observasi lapangan, tetapi memanfaatkan berbagai sumber tertulis yang relevan. Barry et al. (2022) menjelaskan bahwa kajian literatur dapat digunakan untuk melakukan sintesis pengetahuan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan informasi dari berbagai literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, laporan instansi terkait, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan stunting dan pelaksanaan PMT di Kota Palembang. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, menyeleksi, dan mencatat informasi dari berbagai sumber yang sesuai dengan topik penelitian. Literatur yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus kajian, meliputi kondisi stunting di Kota Palembang, pelaksanaan Program PMT, serta klasifikasi, tahapan, dan manfaat analisis kebijakan publik. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi PMT, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaannya, serta mengkaji bagaimana analisis kebijakan publik dapat mendukung peningkatan efektivitas program dalam upaya penanganan stunting di Kota Palembang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Palembang

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan kesehatan di Kota Palembang. Kondisi tersebut terlihat dari perkembangan prevalensi stunting yang masih mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Pemerintah Kota Palembang (2025), prevalensi stunting di Kota Palembang tercatat sebesar 16,1% pada 2021, kemudian menurun menjadi 14,3% pada 2022, meningkat menjadi 18,9% pada 2023, dan kembali menurun secara signifikan menjadi 10,6% pada 2024. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya penanganan stunting, tetapi permasalahan stunting masih

memerlukan perhatian dan intervensi yang berkelanjutan. Pada tahun 2026, jumlah kasus stunting di Kota Palembang dilaporkan menurun dari 148 kasus menjadi 141 kasus. Pemerintah Kota Palembang juga menyebut angka tersebut sebagai yang terendah di Provinsi Sumatera Selatan (Pemerintah Kota Palembang, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting perlu terus didukung melalui intervensi yang tepat dan berkelanjutan.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan stunting dilakukan melalui intervensi di bidang gizi, salah satunya adalah Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Pemberian Makanan Tambahan (PMT) merupakan intervensi yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak yang mengalami masalah gizi atau berisiko mengalami stunting, sehingga dapat mendukung perbaikan status gizi dan pertumbuhan anak. Pelaksanaan intervensi tersebut juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di Kota Palembang. Dalam kebijakan percepatan penurunan stunting Kota Palembang, pemberian makanan tambahan bagi balita dengan permasalahan status gizi termasuk dalam bentuk intervensi spesifik.

Salah satu gambaran pelaksanaan PMT di Kota Palembang dapat dilihat melalui program yang dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Multiwahana. Rahayu et al. (2025) mengevaluasi program PMT dengan menggunakan pendekatan “Satu Hari Satu Telur” yang ditujukan kepada balita stunting. Dalam pelaksanaannya, makanan tambahan diberikan kepada balita sasaran sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung perbaikan status gizi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut telah terlaksana sesuai dengan kegiatan pemberian makanan tambahan kepada sasaran. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam pemantauan apakah makanan tambahan yang diberikan benar-benar dikonsumsi oleh sasaran serta dalam proses distribusinya. Evaluasi program juga menunjukkan bahwa pemantauan hasil masih berfokus pada perubahan berat badan dan tinggi badan, sehingga diperlukan pemantauan yang lebih menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan konsumsi makanan tambahan oleh sasaran.

Selain pelaksanaan di wilayah kerja Puskesmas Multiwahana, implementasi PMT juga dilakukan di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Mayla et al. (2025) menunjukkan bahwa program PMT di wilayah tersebut menyasar balita yang terindikasi mengalami gizi buruk serta ibu hamil dengan kehamilan berisiko. Pemberian makanan tambahan dilakukan secara rutin dengan menyediakan sumber protein hewani dan nabati, antara lain telur ayam, susu UHT, kacang hijau, dan gula aren. Pelaksanaannya dilakukan secara berkala melalui kader Posyandu yang menyiapkan makanan tambahan, kemudian bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK) mendatangi rumah balita sasaran. Selain memberikan makanan, TPK juga memberikan edukasi mengenai percepatan penanggulangan stunting berdasarkan faktor risiko yang dimiliki sasaran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PMT mendapat respons yang beragam dari masyarakat. Sebagian keluarga merasa terbantu karena program dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya keluarga dengan keterbatasan ekonomi, sedangkan sebagian lainnya menilai manfaat program belum dirasakan secara optimal. Penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana, serta beberapa permasalahan dalam proses birokrasi dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat program.

Berdasarkan kedua gambaran pelaksanaan tersebut, implementasi PMT di Kota Palembang dilakukan melalui pemberian makanan tambahan kepada kelompok sasaran dengan melibatkan tenaga kesehatan, kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta keluarga penerima manfaat. Bentuk pelaksanaannya dapat berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sasaran di masing-masing wilayah. Di satu sisi, program telah berjalan melalui pemberian makanan bergizi dan pendampingan kepada sasaran, tetapi di sisi lain masih ditemukannya beberapa kendala, seperti pemantauan konsumsi makanan tambahan, distribusi, keterbatasan anggaran dan sarana, serta pemahaman masyarakat mengenai manfaat program. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PMT tidak hanya berkaitan dengan pemberian makanan tambahan, tetapi juga membutuhkan proses pendampingan, pemantauan, dan koordinasi antarpelaksana agar program dapat berjalan secara optimal.

3.2 Analisis Implementasi PMT Berdasarkan Teori Edward III

Menurut Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Pradiutama et al., 2024). Dalam pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Palembang, keempat aspek tersebut berhubungan langsung dengan penyampaian program kepada masyarakat serta dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

3.2.1 Komunikasi

Dalam teori Edward III, komunikasi berkaitan dengan penyampaian tujuan, informasi, dan arahan kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran (Pradiutama et al., 2024). Komunikasi yang baik harus dilakukan secara jelas dan konsisten agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), komunikasi diperlukan agar orang tua atau pengasuh memahami tujuan, manfaat, serta cara pemberian makanan tambahan kepada anak.

Pelaksanaan PMT di Kota Palembang telah didukung oleh kegiatan penyampaian informasi melalui Posyandu, pamflet, pengumuman, dan pertemuan masyarakat. Penelitian Mayla et al., (2025) menunjukkan bahwa informasi mengenai program PMT telah disampaikan kepada masyarakat, tetapi masih ditemukan sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat program. Penelitian tersebut juga menemukan adanya keluhan mengenai keterlambatan informasi yang diterima masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi PMT telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Permasalahan bukan hanya berkaitan dengan tersedianya informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat dipahami oleh keluarga sasaran. Hal ini penting karena keberhasilan PMT tidak hanya ditentukan oleh pemberian makanan, tetapi juga oleh pemahaman keluarga dalam mendukung konsumsi makanan tambahan dan pemenuhan gizi anak. Selain itu, penelitian Simbolon et al., (2024) mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting menunjukkan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Permasalahan komunikasi dapat memengaruhi pemahaman pelaksana dan masyarakat terhadap tujuan serta pelaksanaan intervensi stunting.

Dengan demikian, komunikasi dalam pelaksanaan PMT di Kota Palembang perlu diarahkan pada penyampaian informasi yang lebih jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh keluarga sasaran. Penggunaan media yang sederhana, seperti gambar atau ilustrasi, serta penguatan komunikasi melalui kader Posyandu dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme PMT. Mayla et al., (2025) merekomendasikan penguatan edukasi masyarakat sebagai bagian dari peningkatan implementasi PMT.

3.2.2 Sumber Daya

Variabel kedua dalam teori Edward III adalah sumber daya. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ketersediaan sumber daya menjadi penting karena kebijakan yang telah dikomunikasikan dengan baik tetap dapat mengalami hambatan apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai.

Dalam pelaksanaan PMT di Kota Palembang, sumber daya manusia telah melibatkan tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Penelitian Mayla et al., (2025) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dan kader Posyandu telah dimanfaatkan dalam pelaksanaan program, serta partisipasi masyarakat tergolong cukup baik. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan pada anggaran dan peralatan.

Keterbatasan sumber daya juga terlihat dalam pelaksanaan program “Satu Hari Satu Telur” di Puskesmas Multiwahana. Rahayu et al., (2025) menemukan bahwa program telah menjangkau sasaran, tetapi belum memiliki anggaran khusus. Penyediaan telur berasal dari Dinas Kesehatan dan

didukung oleh dana taktis Puskesmas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan program masih membutuhkan dukungan pendanaan yang lebih terjamin. Selain anggaran, sumber daya juga berkaitan dengan kemampuan pelaksana dalam melakukan pemantauan. Rahayu et al., (2025) menemukan bahwa pemantauan konsumsi makanan tambahan masih terbatas dan pengawasan lebih banyak dilakukan melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya pelaksana dan sistem pemantauan masih perlu diperkuat agar pelaksanaan PMT tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga memastikan makanan benar-benar dikonsumsi oleh sasaran.

Berdasarkan analisis tersebut, sumber daya dalam implementasi PMT di Kota Palembang sudah tersedia, tetapi masih menghadapi keterbatasan pada aspek anggaran, peralatan, dan penguatan kapasitas pelaksana. Oleh karena itu, dukungan sumber daya yang berkelanjutan diperlukan untuk menjamin pengadaan makanan tambahan, distribusi, pemantauan, serta edukasi kepada keluarga sasaran.

3.2.3 Disposisi

Variabel selanjutnya yang disebutkan dalam teori Edward III yakni disposisi atau sikap maupun respon pelaksana. Sikap para pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Dalam penelitian Mayla et al., (2025) menyebutkan bahwa dalam upaya penurunan dan penanggulangan stunting yang ada di Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang telah menunjukkan adanya komitmen yang tinggi untuk menjalankan suatu kebijakan secara efektif. Dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa para pelaksana memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tugas yang harus dijalankan serta adanya kemampuan, kesediaan, serta komitmen untuk dapat menjalankan tugas tersebut.

Upaya menurunkan angka stunting tentunya melibatkan berbagai pihak dan tidak hanya bergantung pada satu pihak. Adanya komitmen dan keberhasilan yang ingin dicapai harus melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kecamatan hingga perangkat daerah maupun lintas sektor. Adanya kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan lembaga kesehatan dan masyarakat dapat menjadi kunci berhasilnya program PMT ini. Adanya suatu pendekatan yang dilakukan oleh lintas sektor dapat membantu program pemberian makanan tambahan untuk dapat terintegrasi dengan layanan kesehatan serta berbagai program. Menurut Mayla et al., (2025) menyatakan bahwa program ini dijalankan dengan tujuan dapat memberikan dukungan nutri yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan bagi anak-anak yang membutuhkan, dengan adanya program ini menunjukkan adanya perubahan positif baik dari pola makan hingga gizi di masyarakat.

Berdasarkan analisis diatas menunjukkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana di Kecamatan Seberang Ulu 1 telah mampu menunjukkan adanya komitmen yang tinggi untuk dapat menjalankan suatu program secara efektif. Akan tetapi diperlukan adanya keterlibatan dari pihak lain seperti pemerintah daerah, lembaga kesehatan hingga masyarakat yang dapat menerima program yang telah dibuat.

3.2.4 Struktur Birokrasi

Variabel terakhir atau variabel kelima dalam teori Edward III yakni struktur birokrasi. Adanya upaya untuk dapat menjalankan suatu program yang dibentuk yakni pemberian makanan tambahan bagi anak yang berisiko stunting pada Kecamatan Seberang Ulu 1 harus bisa memiliki fondasi yang kuat, dalam hal ini yang menjadi fondasi bagi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yakni struktur birokrasi. Dalam Mayla et al., (2025) menyebutkan bahwa struktur birokrasi menjadi salah satu fondasi utama yang bertugas untuk menopang keberhasilan dalam implementasi suatu program. Struktur yang jelas dalam organisasi memiliki peran penting, hal ini mencakup hal seperti wewenang, pembagian tugas hingga tanggung jawab antar unit serta bagian yang terlibat dalam program tersebut. Adanya struktur organisasi yang baik dapat memastikan setiap bagian atau unit berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing (Mayla et al., 2025).

Indikator sumber daya program pemberian makanan tambahan yang ada pada Kecamatan Seberang

Ulu 1 menunjukkan adanya pembagian tugas yang baik, hal ini dikarenakan tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing staf telah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mayla et al., (2025) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa peran birokrasi yang ada di Kecamatan Seberang Ulu 1 telah dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh para birokrat telah dilakukan dengan sungguh-sungguh kepada masyarakat. Adapun bidang yang memiliki tanggung jawab atas implementasi kebijakan ini adalah bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palembang, petugas gizi puskesmas seberang Ulu 1, serta seluruh aparat kecamatan, dengan adanya tanggung jawab besar pada camat, dan sekretaris kecamatan (Mayla et al., 2025)

Dari adanya analisis diatas, dapat dilihat bahwa struktur birokrasi yang ada pada Kecamatan Seberang Ulu 1 terkait dengan program ini dapat dikategorikan atau dikatakan baik, hal ini dikarenakan adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang sesuai dan jelas, hal ini dapat menghindari adanya tugas atau wewenang yang saling tumpang tindih.

3.3 Klasifikasi Analisis Kebijakan pada Implementasi PMT

Analisis kebijakan publik dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu pelaksanaannya menjadi analisis prospektif, retrospektif, dan terintegrasi. Analisis prospektif dilakukan sebelum suatu kebijakan dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi mengenai berbagai alternatif tindakan dan kemungkinan konsekuensinya. Analisis retrospektif dilakukan setelah kebijakan dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai hasil, dampak, serta permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, analisis terintegrasi merupakan penggabungan antara analisis prospektif dan retrospektif, sehingga proses analisis dapat digunakan baik untuk memperkirakan konsekuensi kebijakan maupun menilai hasil kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam konteks penanganan stunting melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Palembang, analisis yang paling relevan digunakan adalah analisis kebijakan retrospektif. Hal tersebut disebabkan karena kajian dilakukan terhadap program PMT yang telah dilaksanakan, sehingga analisis diarahkan untuk melihat bagaimana program tersebut berjalan, hasil yang diperoleh, serta permasalahan yang masih ditemukan selama pelaksanaannya. Dengan demikian, analisis tidak hanya melihat keberadaan program, tetapi juga menilai kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian Rahayu et al. (2025) mengenai evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan menggunakan satu hari satu telur pada balita stunting di Puskesmas Multiwahana Kota Palembang menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan melalui pemberian telur kepada balita stunting. Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya kendala dalam pemantauan konsumsi dan distribusi serta keterbatasan frekuensi pengawasan terhadap pelaksanaan program. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu program belum secara otomatis menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Oleh karena itu, analisis retrospektif diperlukan untuk mengetahui bagian-bagian program yang telah berjalan dengan baik maupun aspek yang masih membutuhkan perbaikan.

Hasil analisis retrospektif terhadap pelaksanaan PMT juga dapat menjadi dasar bagi analisis prospektif dalam menentukan perbaikan kebijakan pada periode berikutnya. Permasalahan yang ditemukan dalam distribusi, pemantauan konsumsi, maupun pengawasan dapat dijadikan informasi dalam mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sasaran. Dengan demikian, klasifikasi analisis kebijakan dalam kasus PMT tidak hanya berfungsi untuk melihat keberhasilan program yang telah berjalan, tetapi juga memberikan dasar informasi bagi pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan program selanjutnya.

3.4 Tahapan Analisis Kebijakan pada Program PMT

Analisis kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan penilaian terhadap suatu kebijakan, tetapi juga merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Menurut kerangka analisis kebijakan William N. Dunn, proses analisis kebijakan meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Kelima tahapan tersebut saling berkaitan karena hasil dari setiap tahap dapat menjadi dasar bagi tahap berikutnya dalam menghasilkan kebijakan yang lebih tepat. Apabila kendala distribusi dan pengawasan pada Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ini tidak

segera diatasi secara proaktif oleh Pemkot Palembang, maka peramalan (*forecasting*) ke depan menunjukkan beberapa kemungkinan risiko nyata: (1) Target penurunan angka stunting menuju 0% atau mempertahankan tren penurunan terendah di Sumatera Selatan akan melambat karena efektivitas asupan gizi harian anak terputus akibat distribusi mingguan; (2) Terjadinya pemborosan anggaran publik karena makanan tambahan (seperti program satu hari satu telur) berisiko tidak dikonsumsi sepenuhnya oleh sasaran akibat minimnya kontrol keluarga; dan (3) Penurunan motivasi kader Posyandu serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) akibat tidak adanya sistem pelaporan atau alat ukur yang memadai di tingkat operasional. Oleh karena itu, proyeksi ini menuntut adanya rekayasa ulang pada sistem rantai pasok distribusi dan intensitas pengawasan lapangan.

3.4.1 Perumusan Masalah

Tahap pertama dalam analisis kebijakan adalah perumusan masalah. Tahap ini dilakukan untuk menentukan masalah publik yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah. Perumusan masalah tidak hanya mengidentifikasi keberadaan suatu masalah, tetapi juga berusaha memahami kondisi yang melatarbelakangi munculnya masalah tersebut sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kasus penanganan stunting di Kota Palembang, masalah yang menjadi dasar pelaksanaan PMT adalah masih adanya balita yang mengalami stunting dan membutuhkan intervensi untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Namun, permasalahan kebijakan tidak hanya berhenti pada keberadaan balita stunting. Pelaksanaan program juga perlu melihat apakah makanan tambahan telah diberikan kepada kelompok yang tepat, bagaimana makanan tersebut didistribusikan, apakah makanan benar-benar dikonsumsi oleh sasaran, serta bagaimana perkembangan kondisi gizi anak dipantau.

Penelitian mengenai pelaksanaan PMT menggunakan program satu hari satu telur di Puskesmas Multiwihana Kota Palembang menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah dilakukan, tetapi masih ditemukan permasalahan dalam pemantauan konsumsi, distribusi, dan pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perumusan masalah perlu melihat permasalahan secara lebih luas, tidak hanya berdasarkan jumlah balita yang mengalami stunting, tetapi juga berdasarkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan intervensi.

3.4.2 Peramalan

Setelah masalah dirumuskan, tahap berikutnya adalah peramalan atau *forecasting*. Tahap ini digunakan untuk memperkirakan kemungkinan hasil atau konsekuensi dari alternatif kebijakan yang akan diterapkan. Peramalan penting dilakukan agar pemerintah dapat mempertimbangkan kemungkinan keberhasilan maupun permasalahan yang dapat muncul sebelum menentukan tindakan kebijakan. Dalam pelaksanaan PMT, peramalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil apabila program dilaksanakan secara tepat sasaran dan disertai dengan pemantauan yang memadai. Pemerintah juga dapat memperkirakan konsekuensi apabila ditemukan kelemahan dalam distribusi, pengawasan, maupun kepatuhan sasaran dalam mengonsumsi makanan tambahan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mempertimbangkan apakah mekanisme pelaksanaan PMT yang digunakan telah sesuai atau masih membutuhkan perubahan. Peramalan dalam kebijakan PMT tidak hanya berkaitan dengan perkiraan penurunan angka stunting, tetapi juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan program. Perkiraan tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan alternatif perbaikan yang lebih sesuai dengan kondisi sasaran.

3.4.3 Rekomendasi Kebijakan

Tahap selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil analisis terhadap masalah dan kemungkinan konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah dapat menentukan tindakan yang dianggap paling sesuai dengan tujuan kebijakan serta kondisi masyarakat yang menjadi sasaran. Berdasarkan permasalahan pelaksanaan PMT di Kota Palembang, rekomendasi kebijakan dapat diarahkan pada penguatan mekanisme distribusi, pemantauan konsumsi makanan tambahan, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan

program. Rekomendasi tersebut didasarkan pada temuan bahwa program telah dilaksanakan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam aspek pemantauan dan distribusi. Rekomendasi tidak harus berupa pembentukan program baru, tetapi dapat berupa perbaikan terhadap mekanisme pelaksanaan program yang telah tersedia. Pendekatan tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menambah program, tetapi benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan PMT.

3.4.4 Pemantauan

Pemantauan merupakan tahap yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan secara aktual. Dalam konteks PMT, pemantauan diperlukan untuk mengetahui apakah program telah berjalan sesuai dengan ketentuan serta apakah makanan tambahan telah diterima dan dikonsumsi oleh sasaran. Pemantauan tidak hanya berkaitan dengan apakah PMT telah diberikan kepada balita, tetapi juga mencakup ketepatan sasaran, distribusi makanan, konsumsi makanan oleh anak, serta perkembangan kondisi gizi sasaran. Berdasarkan penelitian mengenai program satu hari satu telur di Puskesmas Multiwahana Kota Palembang, masih ditemukan keterbatasan dalam pemantauan konsumsi dan frekuensi pengawasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemantauan merupakan aspek penting yang perlu diperkuat agar pelaksanaan PMT dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.3.5 Evaluasi

Tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan program sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan. Dalam program PMT di Kota Palembang, evaluasi dapat dilakukan dengan melihat berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari sumber daya yang digunakan, proses pemberian makanan tambahan, sampai dengan hasil yang diperoleh oleh kelompok sasaran. Penelitian Rahayu et al. (2025) mengevaluasi program PMT menggunakan pendekatan input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberian satu telur per hari kepada balita stunting telah dilaksanakan, tetapi masih terdapat kendala dalam aspek distribusi dan pemantauan konsumsi. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi terhadap PMT menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan pemberian makanan tambahan. Evaluasi juga perlu melihat apakah pelaksanaan tersebut telah mencapai sasaran dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan program. Hasil evaluasi selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki pelaksanaan PMT agar lebih efektif dalam mendukung upaya penanganan stunting di Kota Palembang.

3.5 Manfaat Analisis Kebijakan dalam Program PMT

Analisis kebijakan memiliki manfaat penting dalam pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), karena dapat digunakan untuk menilai apakah program telah berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, sumber daya, serta mekanisme pelaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan PMT, analisis kebijakan dapat membantu pemerintah dan pelaksana program mengidentifikasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Rahayu et al. (2025) menunjukkan bahwa evaluasi Program PMT Satu Hari Satu Telur dilakukan melalui tiga aspek, yaitu input, proses, dan output. Input meliputi sumber daya manusia, anggaran, material, dan metode; proses mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan; sedangkan output dilihat dari cakupan penerima manfaat. Pendekatan tersebut memungkinkan pelaksana mengetahui bagian program yang telah berjalan dengan baik sekaligus bagian yang masih membutuhkan perbaikan.

Manfaat berikutnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Analisis kebijakan memungkinkan pemerintah membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Pada Program PMT Satu Hari Satu Telur di Puskesmas Multiwahana, distribusi makanan tambahan telah mencapai sasaran yang ditentukan, bahkan cakupan program dilaporkan mencapai 100%. Namun, peningkatan berat badan balita belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari jumlah makanan yang berhasil didistribusikan, tetapi juga perlu memperhatikan apakah makanan benar-benar dikonsumsi dan memberikan perubahan terhadap status gizi anak (Rahayu et al., 2025).

Selain itu, analisis kebijakan bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan program secara berkelanjutan. Evaluasi dapat menghasilkan informasi mengenai hambatan yang terjadi selama implementasi sehingga pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan. Rahayu et al. (2025) menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan melalui proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak program. Hasil evaluasi kemudian dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, pencapaian tujuan, serta hambatan dan peluang perbaikan program.

Analisis kebijakan juga dapat memperkuat monitoring, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PMT. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu memastikan bahwa bantuan diberikan kepada sasaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan program. Dalam penelitian Rahayu et al. (2025), monitoring dan evaluasi dipandang penting untuk mengontrol pelaksanaan program serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, mekanisme pengawasan yang dilakukan masih memiliki keterbatasan karena frekuensi pemantauan konsumsi telur relatif rendah dan pemantauan lebih banyak didasarkan pada perkembangan berat dan tinggi badan anak.

Dari perspektif implementasi kebijakan, analisis kebijakan juga bermanfaat untuk menilai kesiapan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Mayla et al. (2025) menggunakan teori implementasi Edward III yang menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan menganalisis keempat aspek tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah informasi program telah tersampaikan dengan baik, apakah sumber daya mencukupi, apakah pelaksana memiliki komitmen, serta apakah pembagian tugas dan wewenang telah berjalan secara jelas.

Dengan demikian, analisis kebijakan dalam Program PMT tidak hanya berfungsi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan program. Melalui analisis yang dilakukan secara sistematis, pemerintah dapat menentukan kebutuhan anggaran, meningkatkan kapasitas tenaga pelaksana, memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Hal ini penting karena keberhasilan PMT tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan tambahan, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan kesinambungan dukungan dari berbagai pihak. Mayla et al. (2025) menunjukkan bahwa evaluasi berkala dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian program agar manfaatnya terhadap anak sasaran semakin optimal.

3.6 Hambatan Implementasi dan Rekomendasi

Meskipun Program PMT di Kota Palembang secara umum telah berjalan dengan baik, implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan. Berdasarkan penelitian Rahayu et al. (2025), salah satu hambatan utama terdapat pada sistem pengawasan dan distribusi. Program Satu Hari Satu Telur telah mencapai sasaran penerima manfaat, tetapi distribusi dilakukan secara mingguan sehingga terdapat risiko berkurangnya efektivitas program dalam memastikan anak memperoleh asupan telur setiap hari. Selain itu, pengawasan konsumsi telur belum dilakukan secara konsisten karena kunjungan pemantauan oleh petugas gizi umumnya dilakukan sekitar satu kali dalam sebulan.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan sistem pemantauan hasil program. Pemantauan di Puskesmas Multiwihana masih banyak berfokus pada pengukuran berat dan tinggi badan, sementara petugas mengalami kesulitan dalam melakukan pengukuran tinggi badan secara optimal. Akibatnya, pelaksana belum dapat memastikan secara menyeluruh apakah makanan tambahan yang diberikan benar-benar dikonsumsi oleh anak dan memberikan dampak terhadap status gizinya. Rahayu et al. (2025) menegaskan bahwa pengawasan konsumsi perlu dilakukan secara lebih sering dan komprehensif agar

manfaat program dapat lebih optimal.

Dari aspek sumber daya, hambatan juga terlihat pada keterbatasan anggaran. Pelaksanaan Program PMT Satu Hari Satu Telur di Puskesmas Multiwahana belum memiliki anggaran khusus, sehingga penyediaan telur berasal dari Dinas Kesehatan dan didukung dana taktis Puskesmas. Kondisi ini dapat menjadi tantangan terhadap keberlanjutan program apabila dukungan pendanaan tidak tersedia secara konsisten. Oleh karena itu, penguatan alokasi anggaran menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan program PMT (Rahayu et al., 2025).

Sementara itu, penelitian Mayla et al. (2025) menunjukkan adanya hambatan berupa keterbatasan dana, peralatan, dan beberapa ketidakefisienan birokrasi. Walaupun sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan dan kader Posyandu telah dimanfaatkan dengan baik serta partisipasi masyarakat relatif tinggi, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat program. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi program masih perlu diperkuat agar seluruh kelompok sasaran memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme PMT.

Berdasarkan hambatan tersebut, rekomendasi pertama adalah meningkatkan kualitas dan frekuensi monitoring serta evaluasi. Pengawasan sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui pengukuran berat dan tinggi badan, tetapi juga melalui pemantauan konsumsi makanan tambahan, kepatuhan keluarga, serta perubahan kondisi gizi anak. Keterlibatan kader Posyandu dapat diperkuat karena kader berada lebih dekat dengan keluarga sasaran dan dapat membantu melakukan pemantauan secara rutin. Rahayu et al. (2025) merekomendasikan peningkatan frekuensi pengawasan konsumsi, keterlibatan kader, penggunaan teknologi dalam pencatatan dan pelaporan, serta evaluasi secara berkala.

Rekomendasi kedua adalah memperkuat sumber daya dan pendanaan program. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk pengadaan makanan tambahan, distribusi, pemantauan, serta kegiatan edukasi. Selain anggaran pemerintah, kolaborasi dengan pihak swasta dan sumber pendanaan lainnya dapat dipertahankan sebagai bentuk dukungan tambahan. Dalam pelaksanaannya, Program PMT di Palembang telah melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, kader Posyandu, TP PKK, pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi, media, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi tersebut perlu dipertahankan agar program tidak hanya bergantung pada satu sumber daya atau satu institusi saja (Rahayu et al., 2025).

Rekomendasi ketiga adalah meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader Posyandu. Pelatihan diperlukan agar pelaksana memiliki kemampuan yang memadai dalam memberikan edukasi gizi, melakukan pemantauan konsumsi, melakukan pencatatan, serta mengenali anak yang membutuhkan tindak lanjut. Mayla et al. (2025) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga kesehatan yang terlibat melalui pelatihan dan penyuluhan yang lebih intensif. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus memperkuat keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Rekomendasi keempat adalah memperbaiki komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Informasi mengenai PMT perlu disampaikan secara tepat waktu, jelas, dan mudah dipahami oleh orang tua atau pengasuh. Mayla et al. (2025) menemukan bahwa informasi mengenai PMT pada umumnya telah tersedia melalui pamflet, pengumuman di Posyandu, dan pertemuan masyarakat, tetapi masih terdapat keluhan mengenai keterlambatan informasi. Oleh karena itu, materi sosialisasi dapat dibuat lebih menarik dengan menggunakan gambar atau ilustrasi sehingga masyarakat lebih mudah memahami manfaat dan tata cara pemberian makanan tambahan.

Terakhir, koordinasi lintas sektor dan pembagian tugas perlu terus dipertahankan dan diperkuat. Implementasi PMT melibatkan banyak aktor sehingga diperlukan struktur kerja yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam penelitian Mayla et al. (2025), pembagian tugas antarinstansi di Kecamatan Seberang Ulu 1 telah berjalan dengan baik, dengan keterlibatan Dinas Kesehatan, Puskesmas, kecamatan, serta berbagai pihak lainnya. Kondisi tersebut dapat dipertahankan melalui koordinasi rutin, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme pelaporan yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, hambatan implementasi PMT di Kota Palembang bukan menunjukkan bahwa program gagal, melainkan menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan distribusi dengan keberhasilan hasil akhir program. Kedua penelitian menunjukkan bahwa PMT telah mampu menjangkau sasaran dan memberikan dampak positif terhadap status gizi serta kesadaran masyarakat, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek pengawasan, pendanaan, sumber daya manusia, komunikasi, distribusi, dan koordinasi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan perlu diarahkan pada penguatan sistem monitoring dan evaluasi, penyediaan sumber daya yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas pelaksana, edukasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan PMT dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian, Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan stunting di Kota Palembang. Pelaksanaannya telah melibatkan berbagai pihak dan diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan, tetapi dalam penerapannya masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama pada pemantauan konsumsi, distribusi, pengawasan, ketersediaan sumber daya, pendanaan, dan komunikasi dengan masyarakat.

Ditinjau menggunakan teori implementasi Edward III, pelaksanaan program dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan jalannya program. Selain itu, berdasarkan analisis kebijakan publik, pelaksanaan PMT dapat dikaji secara retrospektif karena program telah berjalan dan dapat dilihat dari hasil serta permasalahan yang muncul selama pelaksanaannya. Tahapan analisis yang meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi dapat digunakan untuk melihat kebutuhan perbaikan program. Dengan penguatan pada aspek pelaksanaan dan analisis kebijakan, PMT diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih optimal dalam mendukung penanganan stunting di Kota Palembang.

Pelaksanaan Program PMT di Kota Palembang perlu diperkuat melalui pemantauan dan pengawasan yang lebih teratur, terutama untuk memastikan makanan tambahan diterima dan dikonsumsi oleh sasaran sesuai kebutuhan. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kader, dan pihak yang terlibat juga diperlukan, disertai dukungan anggaran, sarana, serta koordinasi yang lebih baik. Edukasi kepada keluarga sasaran perlu terus dilakukan agar PMT tidak hanya dipahami sebagai pemberian makanan, tetapi menjadi bagian dari upaya pemenuhan gizi anak. Hasil pemantauan dan evaluasi juga perlu dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan program berikutnya sehingga PMT dapat berjalan lebih tepat sasaran dan mendukung upaya penanganan stunting di Kota Palembang.

Daftar Pustaka

- Asfiah, E. W., Ramadhani, P. O., Yulianto, H., Yudha, P. P. K., Alamsyah, M. I., Egimanda, R. A., & Angin, R. (2022). Analisis kebijakan publik: Identifikasi dan perumusan masalah. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 4(2), 201–208. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/consilium/article/view/4696/3537>
- Barry, E. S., Merkebu, J., & Varpio, L. (2022). State-of-the-art literature review methodology: A six-step approach for knowledge synthesis. *Perspectives on Medical Education*, 11(5), 281–288. <https://doi.org/10.1007/s40037-022-00725-9>
- Bundi, P., & Trein, P. (2022). Evaluation use and learning in public policy. *Policy Sciences*, 55(2), 283–309. <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09462-6>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi ke-2). Gadjah Mada University Press.
- Epa, A., Apriyani, A., Maryam, J., Azahra, S. N. I., Muthmainah, Z. A., & Herdiana, D. (2025).

- Analisis kebijakan publik. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 42–49. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.321>
- Fajar, S. A., Anggraini, C. D., & Husnul, N. (2022). Efektivitas pemberian makanan tambahan pada status gizi balita Puskesmas Citeras, Kabupaten Garut. *Nutrition Scientific Journal*, 1(1), 30–40. <https://doi.org/10.37058/nsj.v1i1.5975>
- Karso, A. J. (2026). *Buku ajar kebijakan sektor publik di Indonesia* (Edisi Revisi). Ganesha Kreasi Semesta.
- Linquiti, P. (2024). Operationalizing Lasswell’s call for clarification of value goals: An equity-based approach to normative public policy analysis. *Policy Sciences*, 57(1), 193–219. <https://doi.org/10.1007/s11077-024-09525-w>
- Mayla, J. D., Isabella, & Putra, D. A. (2025). Implementasi program pemberian makanan tambahan bagi anak yang berisiko stunting. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 17–31. <https://doi.org/10.33558/governance.v13i1.10016>
- Newman, J., Patmisari, E., & Widianingsih, I. (2022). Policy analytical capacity and “Eastern” styles of policy analysis: Evidence from West Java Province, Indonesia. *Policy Sciences*, 55(3), 469–485. <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09470-6>
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting: Studi kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 12(2), 74–83.
- Pemerintah Kota Palembang. (2020). *Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan, Pengendalian, dan Penurunan Stunting Terintegrasi*. JDIH Kota Palembang.
- Pemerintah Kota Palembang. (2025). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2026*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang.
- Pemerintah Kota Palembang. (2026a, 24 Mei). *Dewi Sastrani: Angka stunting di Palembang terus menurun*. Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang. <https://palembang.go.id>
- Pemerintah Kota Palembang. (2026b). *Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 47 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan di Pos Pelayanan Terpadu Kota Palembang Tahun 2026*. JDIH Kota Palembang.
- Pradiutama, E. W., Rivai, A., & Astuti, A. S. (2024). Implementasi kebijakan penanaman modal pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 1(2), 10–23.
- Rahayu, R. S., Ainy, A., Budi, I. S., & Lubis, A. I. (2025). Evaluasi program pemberian makanan tambahan menggunakan satu hari satu telur pada balita stunting di Puskesmas Multiwahana Kota Palembang. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 10(1), 84–95. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v10i1.23401>
- Riedho, M. R. Z., & Angga, I. M. P. (2024). Membangun silogisme pendekatan naratif dalam proses pembuatan dan analisis kebijakan publik William N. Dunn. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(1), 12–32. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.53502>
- Rosalina, S., & Heriziana, H. (2024). Determinan stunting pada anak balita di Kelurahan 1 Ulu Palembang. *Jurnal Sains dan Kesehatan*, 8(1), 84–90.

<https://doi.org/10.57214/jusika.v8i1.543>

- Salsabila, G., Najmah, Aprina, F., Arpansah, Cahyono, H., & Nurita, Y. (2024). Analisis spasial indikator faktor risiko balita stunting Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 23(1), 15–25.
- Simbolon, D., Maigoda, T. C., Meriwati, Efrida, S., Yunita, & Widiastuti, H. (2024). Policy implementation to accelerate stunting reduction: A qualitative study. *Indonesian Journal of Health Administration (Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia)*, 12(2), 270–279. <https://doi.org/10.20473/jaki.v12i2.2024.270-279>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tohardi, A. (2025). *Alternatif kebijakan pendidikan multikultural*. Deepublish.
- Ulya, N. A., & Maharani, C. (2024). Evaluation of the implementation of the supplementary food program as an effort to improve the nutrition of stunting toddlers in the work area of the Puskesmas Karangdoro. *MEDIKORA*, 23(2), 115–127. <https://doi.org/10.21831/medikora.v23i2.79393>
- Wiliyanarti, P. F., Nasruallah, D., Salam, R., & Cholic, I. (2022). Edukasi pemberian makanan tambahan berbasis bahan lokal untuk balita stunting dengan media animasi. *Media Gizi Indonesia*, 17(1SP), 104–111. <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1SP.104-111>